



Regita Ayu Agustin¹
 Salviaputri Irsha
 Khamini²
 Najwa Mayang Dayatri³
 Rudiana⁴

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: MENCiptakan GENERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS DI KOTA BANDUNG

Abstrak

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung, yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran dan pemberdayaan keluarga. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program ini telah diterapkan di sekitar 120 dari 151 kelurahan, dengan fokus pada penguatan institusi keluarga dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga faktor-faktor seperti aturan agama dan peran suami juga mempengaruhi keputusan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB, perlu ada pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi dan kegiatan edukatif agar program KB dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Strategi, Kebijakan, Program.

Abstract

The Family Planning (KB) Program in Bandung City, managed by the Population and Family Planning Control Agency (DPPKB), aims to improve the quality of life of the community through birth control and family empowerment. Since its launch in 2016, the program has been implemented in around 120 of 151 sub-districts, with a focus on strengthening family institutions in economic and social aspects, as well as factors such as religious rules and the role of husbands also influence the decision of fertile age couples (PUS) to participate in the KB program, there needs to be public understanding of the importance of KB, efforts continue to be made to increase public awareness through promotion and educational activities so that the KB program can be more effective in achieving its goals. This study applies a qualitative descriptive method through observation and interviews.

Keywords: Family Planning, Strategies, Policy, Program.

PENDAHULUAN

Fenomena kepadatan penduduk yang sering kali menimbulkan masalah kesejahteraan di suatu daerah, serta pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat yang bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Bandung ini diperlukan adanya upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun kualitas masyarakat di daerahnya dapat menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dimana titik awal untuk mensejahterakan masyarakat adalah berangkat dari keluarga. Keluarga adalah pondasi dasar dalam membangun pola pikir manusia, berinteraksi, dan belajar. Hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan 1 kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Maka dari itu, fokus dari permasalahan ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Bandung, terkhusus bidang Keluarga Berencana

^{1,2,3,4)} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
 email regita23001@mail.unpad.ac.id¹, salvia23001@mail.unpad.ac.id², najwa23032@mail.unpad.ac.id³,
 rudiana@unpad.ac.id⁴

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Hal. 54 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi ketatanegaraan pada saat itu. Di mana dalam Undang-Undang ini terdapat urusan mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada pasal 11 yang merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Undang-undang No.23 tahun 2014 halaman 54 tentang pembagian urusan pemerintahan bagian pengendalian penduduk dan keluarga berencana terkait bidang keluarga berencana (KB) di daerah kabupaten/kota. Berperan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memberikan kerangka hukum jelas dalam pelaksanaan penyelenggaraan program KB di tingkat daerah yang menegaskan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang termasuk tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kualitas keluarga melalui program KB tidak hanya berfokus pada pengaturan jumlah anak, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengatur kelahiran anak, jarak antar-kelahiran, serta usia ideal saat melahirkan, program ini bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Namun, pelaksanaan program KB di lapangan masih dihadapi oleh sejumlah tantangan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus berubah-ubah, baik meningkat maupun menurun, masih kurangnya partisipasi dan kesadaran oleh masyarakat dalam mengikuti program KB. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB oleh DPPKB kota Bandung. Implementasi program KB tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga melalui pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran serta masyarakat.

Dengan demikian, berawal dari peraturan mengenai implementasi program Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan mampu mencapai tujuan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga di kota Bandung.

Keluarga Berencana adalah program dibawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mana dalam pelaksanaannya di tiap wilayah dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam bidang Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian yang memerlukan peran serta masyarakat melalui program-program yang ada untuk mencapai tujuan dari program KB itu sendiri. Jika program KB terlaksana dengan baik di masyarakat, maka hal ini dapat membawa manfaat baik bagi pula keluarga kecil, masyarakat luas, bahkan negara.

Di Kota Bandung, strategi dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana masih perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan sosialisasi program kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan sadar akan pentingnya KB. Dari hasil wawancara, data menunjukkan bahwa saat ini, di Kota bandung mengalami penurunan angka TFR Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) dari data rata-rata Badan Pusat Statistik Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat dianggap masih minim pengetahuan tentang hak-hak reproduksi dan masih banyak stigma sosial yang mengelilingi dan beredar di masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Program Keluarga Berencana, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk sosialisasi dan edukasi, serta melibatkan komunitas

lokal dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, diharapkan implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga di Kota Bandung.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian guna mengeksplorasi secara mendalam mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Bandung: Peningkatan Kualitas, Strategi, dan Tantangan. Metode ini juga dibantu dengan pengumpulan informasi menggunakan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan menggunakan studi literatur.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini menjelaskan dan merumuskan dengan bahasa penelitian yang didapatkan dari informan di lapangan secara langsung sebagai kegiatan untuk memperoleh penjelasan-penjelasan tentang kondisi yang dihasilkan deskripsi terkait objek sebuah penelitian. Selain itu, penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif dengan artian penelitian ini mendalam tentang individu, sebuah organisasi, sebuah program kerja atau kegiatan, dan lainnya. Tujuan dari tipe deskriptif ini yaitu untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dan lebih mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus nantinya menghasilkan data yang nantinya dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah teori.

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di kota Bandung yang bertepatan di kantor DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Selanjutnya, kami mengumpulkan data lewat wawancara yang dilakukan secara langsung pada tanggal 26 November yakni hanya melalui satu informan saja, yakni langsung kepada Kepala Bidang terkait, Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Bandung. Terakhir, proses pengumpulan data melalui dokumentasi yang kami ambil ketika pelaksanaan mini riset, baik selama perjalanan, seluruh kegiatan yang kami lakukan, dan di kantor DPPKB itu sendiri tentunya melalui izin terlebih dahulu kepada staff dan informan yang berkaitan di tempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Mempengaruhi Tingkat Angka Kelahiran di Kota Bandung

Indonesia adalah negara yang berkembang yang mana memiliki program pembangunan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kota Bandung itu sendiri sedang menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang tinggi dan pemerintah Kota Bandung khususnya DPPKB mengeluarkan kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program ini diharapkan dapat mengedukasi keluarga mengenai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), yang berfokus pada pertumbuhan yang seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa kependudukan menjadi pusat kegiatan pembangunan, di mana kebijakan kependudukan terintegrasi dengan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Program KB berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi tingginya angka pertumbuhan penduduk. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada pemerintahnya itu sendiri terkhusus DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang baik dari lembaga penyelenggara sejauh ini masyarakat pasti sudah tidak asing dan mengetahui keberadaan program KB, sehingga tantangan utama kini ialah bukan tentang masyarakat tidak mengetahui program KB ini melainkan dengan partisipasi aktif masyarakatnya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB menyatakan bahwa Total Fertility Rate (TFR) di Jawa Barat rata-rata 2,11, sementara Kota Bandung berada di angka 1,83. Angka ini masih di bawah rata-rata dan jika terus menurun, dapat mengarah pada masalah demografis seperti yang dialami Jepang. Sasaran kelompok program KB di Kota Bandung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) berusia 18 hingga 39 tahun yang mana mereka berhak mendapatkan perlindungan dan hak reproduksi untuk membangun keluarga berkualitas di masa yang akan

datang. Komunikasi yang dilakukan oleh DPPKB Kota Bandung juga perlu dilakukan secara efektif kepada calon peserta KB karena sangat membantu untuk keberhasilan program ini. Promosi yang dilakukan nya juga tentu harus kreatif dengan dilakukan melalui berbagai media seperti iklan cetak dan elektronik, spanduk, brosur, serta kegiatan promosi di Puskesmas dan rumah sakit dengan slogan "Ayo Ikut KB 2 Anak Sehat".

Pada tahun 2024, Kota Bandung terus mengalami pertumbuhan penduduk akibat perpindahan dan kelahiran bayi, ini menjadi hal yang perlu ditinjau lebih dalam oleh pemerintah Kota Bandung karna sangat penting bagi Kota Bandung sendiri untuk memiliki proporsi penduduk yang ideal agar kesejahteraan dapat tercapai lebih mudah. Disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan kependudukan dengan daya dukung lingkungan.

Menurut Prof John Cleland, promosi KB di negara dengan tingkat kelahiran tinggi dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta mencegah kematian ibu dan anak. Hal ini juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan pencapaian pendidikan dasar universal. Keberhasilan program KB sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan pendekatan yang mempertimbangkan konteks politik serta budaya.

Strategi Konkret yang Diterapkan Oleh DPPKB Kota Bandung dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana

Pada tahun 2023 lalu, DPPKB Kota Bandung terus-menerus berupaya untuk memperluas jangkauan penerapan program yang bernama Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Sampai saat ini, program tersebut telah diterapkan kurang lebih pada 120 kelurahan dari total keseluruhan target 151 kelurahan di wilayah Kota Bandung. Program Kampung KB ini adalah program nasional yang diimplementasikan pada wilayah setingkat desa, dengan fokus pada integrasi dan sinergi dalam pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Program Kampung KB sudah diselenggarakan sejak 2016 dan telah dijalankan dengan beragam kegiatan dilaksanakan untuk memperkuat dan memberdayakan keluarga, mencakup aspek ekonomi, keagamaan, lingkungan, serta sosial. Program Kampung KB bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat menjadi individu yang unggul dan berdaya saing. Namun, dari sekian banyak program keluarga berencana yang salah satunya adalah Kampung KB, masih terdapat adanya kendala dalam proses penyelenggarannya menurut Kepala DPPKB Kota Bandung pada masa itu Dewi Kanasari "Publikasi dan promosi Kampung KB masih terbilang minim, sehingga belum banyak diketahui masyarakat umum."

Karena itu, berkaca dari tantangan dan kendala yang ada di tahun sebelumnya berdasarkan observasi dan penelitian yang telah berlangsung beberapa minggu yang lalu, didapati bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung telah merencanakan dan menerapkan beberapa strategi yang konkret dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus untuk menyikapi tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa strategi konkret yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana :

1. PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja)

Program DPKKB Kota Bandung salah satunya menjalankan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Program PKBR adalah sebuah program yang diimplementasikan oleh DPPKB Kota Bandung yang dibentuk untuk mengatasi upaya permasalahan yang terjadi pada remaja agar dapat memiliki kehidupan berkeluarga yang sejahtera di masa depan kelak dan terhindar dan dapat menghindari resiko kehamilan diluar nikah. Program PKBR ini diharapkan mampu membantu remaja agar tidak terjerumus pada pelanggaran yang menyebabkan terkena dampak negatif nantinya. PKBR adalah sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka, di mana para remaja dikumpulkan dan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja, salah satu materi sosialisasi nya adalah mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini sangat penting diketahui oleh remaja agar

dapat meningkatkan kesadaran mengenai usia ideal dalam melakukan suatu perkawinan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, DPPKB kota Bandung menunjukkan bahwa telah melakukan tindakan fungsional dengan memperkenalkan program ini sehingga remaja Kota Bandung dapat mendapatkan manfaat bahwa program PKBR ini ditujukan untuk mereka dan memiliki tujuan yang jelas untuk dapat menciptakan perubahan.

2. Duta Genre

DPPKB Kota Bandung mengadopsi pendekatan strategis dalam pelaksanaan sosialisasi programnya dengan melibatkan Duta GenRe sebagai komunikator utama. Para Duta GenRe, yang merupakan pemenang kompetisi tingkat kota dan memiliki keahlian sebagai pendidik serta konselor sebaya, dipilih karena kredibilitas mereka yang tinggi, didukung oleh kompetensi yang telah teruji dan sertifikasi resmi. Pendekatan ini sangat relevan, mengingat program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) ditujukan untuk remaja, sehingga komunikasi yang dilakukan antar sesama remaja lebih efektif dalam menciptakan rasa nyaman dan keterbukaan. Pesan utama yang disampaikan melalui Duta GenRe adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik remaja. Materi ini dirancang agar mudah dipahami, tidak terkesan mengurui, dan disampaikan secara menarik untuk memastikan penerimaan yang optimal. Salah satu strategi komunikasi yang diterapkan adalah penggunaan jargon "Salam GenRe," yang bertujuan memperkuat pesan melalui pengulangan dan membangun identitas yang melekat pada program tersebut.

3. Komunikasi

DPPKB melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program KB. Ini dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, untuk menjangkau lebih banyak individu dan keluarga.

4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi

DPPKB menyediakan layanan kesehatan reproduksi komprehensif, yang meliputi penyuluhan tentang alat kontrasepsi dan kesehatan ibu dan anak secara gratis. Layanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan akses terhadap alat kontrasepsi. Salah satu program nya adalah kegiatan Pelayanan yang bernama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau yang biasa dikenal dengan sebutan KB MKJP yang dilaksanakan secara gratis untuk seluruh masyarakat Kota Bandung. Pelayanan KB MKJP meliputi IUD (Intrauterine Device), sterilisasi wanita, dan implant/norplant. Program KB MKJP gratis ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya dari DPPKB bidang Keluarga Berencana Kota Bandung untuk menurunkan angka stunting dan menekan angka kematian Ibu dan Bayi. Program MKJP menjadi salah satu langkah dalam menyosialisasikan pemenuhan hak-hak reproduksi kepada masyarakat di Kota Bandung.

5. Monitoring dan Evaluasi

Program Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, DPKKB melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasil 16 evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi dan pendekatan yang diterapkan dalam program KB.

Kesulitan dan Tantangan yang Dihadapi Oleh DPPKB Bidang Keluarga Berencana Dalam Proses Pelaksanaan Program yang Ada

Suatu program dari pemerintah tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik, pasti selalu ada dan kesulitan di setiap prosesnya. Begitupun dengan Program Keluarga Berencana tantangan terkhusus di Kota Bandung yang menghadapi beberapa kesulitan dan tantangannya. Kota Bandung mengalami kendala di angka TFR (Total Fertility Rate) yang di mana Kota Bandung masih jauh di bawah standar nasional. TFR ini yang kemudian membuat DPPKB mencari cara untuk mengatasi ketertinggalan ini. Hal ini juga tidak membuat Program Keluarga Berencana harus dihapuskan di Kota Bandung, Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Bandung dengan tegas mengucapkan bahwa Program Keluarga Berencana tetap dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan. Namun, orientasi dan tujuan program ini diubah. Sebagaimana tujuan awal dari Program Keluarga Berencana yaitu pengurangan angka kelahiran serta pengendalian penduduk karena banyaknya dan tidak terkendalinya angka kelahiran di Indonesia, tujuan baru

dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah memperbaiki kualitas kesehatan pada ibu dan anak serta mencegah terjadinya stunting.

Angka TFR yang kurang dari standar nasional membuat DPPKB Kota Bandung khawatir akan regenerasi dan tingkat kelahiran yang ditakutkan akan seperti negara Jepang. Tantangan lainnya adalah bergesernya usia optimal untuk seorang ibu untuk hamil dan memiliki anak. Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Bandung, Ibu Rosye mengatakan bahwa usia optimal seorang ibu hamil adalah di sekitar 20 - 30 tahun, namun sekarang ini banyak yang menunda kehamilan, hamil terlalu dini, dan bahkan sudah muncul pemikiran tidak ingin memiliki anak atau child free. Pergeseran ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPPKB bidang keluarga berencana yang memiliki fokus baru terkait kualitas kesehatan ibu dan anak. Hal ini menjadi salah satu faktor bayi yang dilahirkan tidak sehat dan bisa saja terkena stunting. Selain itu, kesehatan fisik dan mental ibu mengandung pun terpengaruhi oleh usia pada saat hamil. Pada saat hamil, seorang ibu akan mengalami perubahan signifikan, dikutip dari kemkes.co.id seorang ibu hamil cenderung akan mengalami peningkatan kecemasan yang akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kecemasan ini akan memicu datangnya stres, insomnia, depresi, dan lain sebagainya. Gangguan kesehatan mental ini akan berpengaruh pada perkembangan janin, seperti perkembangan yang buruk, prematur, hingga BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah). Hal inilah yang kemudian menjadi tujuan dan arah gerak DPPKB Kota Bandung dalam menjalankan Program Keluarga Berencana.

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Bandung akan pentingnya Program Keluarga Berencana ini. Sebagian besar masyarakat masih menganut pemikiran yang menjunjung adat, Program KB dianggap hal yang tabu, sudah adanya pemikiran untuk tidak memiliki anak, dan pemahaman serta sosialisasi program yang kurang menyeluruh. Hal ini yang kemudian menjadi fokus lain dari DPPKB untuk melakukan sosialisasi sejak remaja dan memperbanyak kerjasama dengan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

DPPKB sedang mencari cara mengatasi tantangan dalam keberlangsungan Program Keluarga Berencana ini. Dengan dukungan pemerintah daerah baik lewat pendanaan atau lainnya, DPPKB menjalankan berbagai macam program baik secara independen maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya. Tantangan ini juga tidak membuat DPPKB Kota Bandung berhenti dan tidak melakukan inovasi. Banyak inovasi-inovasi yang dibentuk demi mengatasi kesulitan dan tantangan dalam proses berjalannya Program Keluarga Berencana di Kota Bandung.

SIMPULAN

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengelola pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meski TFR (Total Fertility Rate) Kota Bandung masih di bawah rata-rata nasional, program ini tetap relevan dengan tujuan baru yang fokus pada kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting. Pelaksanaan program KB dilakukan melalui strategi konkret seperti penguatan program Kampung KB, pelibatan Duta Genre untuk edukasi remaja, penyediaan layanan kesehatan reproduksi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Meski demikian, masih terdapat kendala publikasi yang minim, pergeseran usia ideal kehamilan, serta fenomena child-free menjadi tantangan yang harus diatasi. Dengan komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, serta pendekatan inovatif, Program KB di Kota Bandung diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, berdaya saing, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Program ini bukan hanya tentang pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2019). KIP DPPKB Kota Bandung.
 Diskominfo Kota Bandung. (2021). Cegah Stunting dan Atur Jarak Kehamilan, Pemkot Bandung Gelar Gebyar Pelayanan KB Gratis. Jabarprov.go.id.

- Hidayat, M. H., Alghifari, & Manurung, H. (2014). Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung [Universitas Padjadjaran].
- Lestari, D. I., & Syahri, A. (2022). Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Pasca Melahirkan.yankes.kemkes.co.id.
- Saylandi, I. I., & Oesman, M. A. (2021). Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung melalui Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. SPESIA, 7.